



► PEMILU 2019

Perubahan Dapil Rawan Gejolak

JOGJA—Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kota Jogja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja perlu mengakomodasi masukan semua pihak dalam memutuskan perubahan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2019.

*Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com*

Mengingat perubahan dapil sangat berpengaruh terhadap peta politik partai sehingga rawan terjadi gejolak. Ketua Panwas Kota Jogja Iwan Ferdian menilai perubahan skema dapil ini terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Sehingga banyak partai, atau bahkan bakal calon legislatif sudah melakukan investasi politik di daerah-daerah tertentu untuk menjaga suara sampai pemilu nanti.

Kendati demikian, pihaknya memahami perubahan dapil itu tidak terlepas dari Peraturan KPU (PKPU) yang belum lama dikeluarkan. Karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya gejolak, ia meminta KPU harus bersikap adil, mendengarkan masukan dan saran dari semua pihak ketika memutuskan skema dapil. Ketika dapil sudah diajukan ke KPU RI dan menjadi keputusan resmi, KPU Kota Jogja segera menyosialisasikannya kepada partai politik dan masyarakat. "Apapun keputusannya KPU harus segera menyosialisasikannya kepada masyarakat," ujar Iwan.

Iwan juga meminta KPU untuk memetakan kerawanan-kerawanan akibat perubahan dapil. "KPU wajib memetakan gejolak yang akan timbul di masyarakat ketika mengusulkan dapil ke KPU RI nantinya," ujar Iwan.

Saat ini, KPU Kota Jogja sudah menyiapkan tiga rancangan dapil untuk Pemilu 2019. Rancangan dapil tersebut akan diuji publik pada Sabtu, akhir pekan ini.

► Perubahan skema dapil ini terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

► Penentuan kursi di tiap dapil dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dibagi jumlah kuota kursi DPRD.

● Lebih Lengkap Halaman 14

Rancangan Dapil Pemilu 2019

Rancangan Pertama Lima dapil seperti Pemilu 2014

Dapil III
■ Kecamatan Gedungtengen, Jeto dan Tegaltarjo
■ Jumlah kursi delapan

Dapil IV
■ Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman
■ Jumlah kursi enam

Dapil II
■ Kecamatan Gondomanan, Nampian, Pakualaman, dan Winabratun
■ Jumlah kursi tujuh

Dapil I
■ Kecamatan Kraton, Manirjeron, dan Mergansari
■ Jumlah kursi sembilan

Dapil V
■ Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede
■ Jumlah kursi 10

Rancangan Kedua

- Enam dapil dengan memisahkan Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede.
- Umbulharjo dalam rancangan masuk dalam dapil lima (7 kursi).
- Kotagede masuk dalam dapil enam (3 kursi).

Rancangan Ketiga

- Tetap mempertahankan lima dapil dengan perbedaan pada dapil empat yang tadinya memperoleh kuota enam kursi menjadi tujuh kursi karena ada tambahan Kecamatan Pakualaman.
- Opsi rancangan ketiga ini merubah komposisi dapil dua yang tadinya tujuh kursi menjadi enam kursi.

Sumber KPU Kota Jogja

Perubahan Dapil...

Ketiga rancangan dapil tersebut, yakni lima dapil, sesuai dengan pola yang digunakan dalam Pemilu 2014 lalu dengan rincian dapil satu terdiri dari Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergangsan dengan jumlah kursi sembilan.

Kemudian dapil dua terdiri dari Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman dan Wirobrajan (tujuh kursi). Dapil tiga terdiri dari Kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo (delapan kursi). Dapil empat terdiri dari Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman (enam kursi). Dan Dapil lima terdiri dari Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede (10 kursi).

Sementara rancangan kedua, yakni enam dapil dengan memisahkan Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede. Umbulharjo dalam rancangan masuk dalam dapil lima (7 kursi), dan Kotagede masuk dalam dapil enam (3 kursi).

Adapun rancangan ketiga, yakni tetap mempertahankan lima dapil dengan perbedaan pada dapil empat

yang tadinya memperoleh kuota enam kursi menjadi tujuh kursi karena ada tambahan Kecamatan Pakualaman. Opsi rancangan ketiga ini mengubah komposisi dapil dua yang tadinya tujuh kursi menjadi enam kursi.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan tiga rancangan dapil itu merupakan hasil pengerucutan dari sebelumnya enam rancangan dapil. Ketiga rancangan dapil itu akan diujipublikkan untuk memperoleh masukan dari partai. "Saran dan masukan dari partai politik akan kami sampaikan ke KPU RI. Karena penetapan dapil ini yang memutuskan adalah KPU RI," kata Wawan.

Wawan mengatakan penentuan kursi di tiap dapil dilakukan berdasarkan jumlah penduduk Kota Jogja dibagi jumlah kuota kursi DPRD Kota Jogja. Penduduk Kota Jogja yang dihitung sebanyak 410.262 jiwa dibagi 40 kursi DPRD Kota Jogja. Hasil pembagian tersebut kemudian dibagi tiap kecamatan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005